



# PEMERINTAH KOTA MEDAN

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112  
Telepon. (061) 4512412 Faks. (061) 4579228  
E-mail : sekretariat@pemkomedan.go.id, Website : www.pemkomedan.go.id

### PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional pupuk sangat penting untuk meningkatkan produktifitas dan produksi komoditas pertanian;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan subsidi pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani;
  - c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2013 tentang Alokasi Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014, perlu mengatur kebutuhan pupuk bersubsidi dalam satu Peraturan Walikota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Alokasi Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, Dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
23. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
24. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa Yang Beredar Di Pasar;
25. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;

26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N,P, Dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/ PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan Pembayaran Dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 366);
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 491);
30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, Dan Pembenh Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 664);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
33. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1055);
34. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
35. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2013 tentang Alokasi Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014;
36. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Di Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 1);

37. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);
38. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2013 Nomor 6);
39. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2014 Nomor 1);
40. Peraturan Walikota Medan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2013 Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Medan Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2014 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
2. Daerah adalah Kota Medan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
4. Walikota adalah Walikota Medan.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan.

7. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
8. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
9. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah.
10. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktifitas yang optimal dan berkelanjutan.
11. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
12. Harga Eceran Tertinggi, yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di penyalur lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia.
13. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
14. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
15. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
16. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang dengan luasan tertentu.
17. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk An-organik pupuk Organik di dalam negeri.
18. Penyalur di lini III adalah distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.
19. Penyalur di lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.

20. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
21. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani, yang selanjutnya disingkat (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, dan petambak rakyat berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
22. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota.
23. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik dari masing-masing produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
24. Lini II adalah lokasi gudang produsen di wilayah ibukota provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.
25. Lini III adalah lokasi gudang produsen dan/atau distributor di wilayah daerah yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen.
26. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah kecamatan dan/atau kelurahan yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor.
27. Penyuluh Pertanian Lapangan, yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang memberikan informasi/penyuluhan.

## BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani, kecuali bagi petambak pembudidaya ikan dan/atau udang laing luas 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.



### BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah serta alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun Anggaran 2014.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, peternak, dan petambak berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis dan PPL.
- (4) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan pembudidaya ikan dan/atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayah kecamatan.

#### Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah kecamatan, waktu, dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar kecamatan ditetapkan Walikota.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan petani, realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penetapan dari Walikota berdasarkan atas rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan bersangkutan dari sisa alokasi bulan-bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi 1 (satu) tahun.

### BAB IV PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Produsen.

## Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke petani atau kelompoktani diatur sebagai berikut:
  - a. penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur di lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggungjawab kecamatan;
  - b. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a mempertimbangkan kebutuhan kelompoktani dan alokasi di masing-masing wilayah kecamatan;
  - c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu; dan
  - d. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a bagi petani yang belum mempunyai kelompoktani dapat dilakukan dengan penunjukan identitas serta rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani atau kelompoktani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan pendataan RDKK di wilayah kecamatan, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompoktani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh PPL.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP Daerah.

## Pasal 7

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Penyalur di lini III, dan lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, peternak, dan petambak di wilayah tanggung jawab kecamatan sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen berkoordinasi dengan Dinas untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

## Pasal 8

- (1) Penyalur di lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pupuk Urea = Rp 1.800,00; per kg;
  - b. Pupuk SP-36 = Rp 2.000,00; per kg;
  - c. Pupuk ZA = Rp 1.400,00; per kg;
  - d. Pupuk NPK = Rp 2.300,00; per kg;
  - e. Pupuk Organik = Rp 500,00; per kg.
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, peternak, petambak di lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
- a. Pupuk Urea = 50 kg atau 25 kg;
  - b. Pupuk SP-36 = 50 kg;
  - c. Pupuk ZA = 50 kg;
  - d. Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg;
  - e. Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg.

#### Pasal 9

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca, dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan:

“Pupuk Bersubsidi Pemerintah”  
Barang Dalam Pengawasan

### BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari lini I sampai lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

#### Pasal 11

- (1) KPPP Daerah wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan, dan harga pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, KPPP dibantu oleh PPL.

#### Pasal 12

- (1) KPPP Daerah wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Medan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Alokasi Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2013 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 23 Januari 2014

Plt. WALIKOTA MEDAN  
WAKIL WALIKOTA,

ttd.

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 23 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2014 NOMOR 6



LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA MEDAN  
 NOMOR 6 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014  
 MENURUT SUB SEKTOR DAN JENIS PUPUK

NO.	SUB SEKTOR	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanaman Pangan dan Holtikultura	520	70	104	291	202
2	Peternakan	5	0	3	0	4
3	Perikanan Budidaya	22	17	0	0	17
<b>JUMLAH</b>		<b>547</b>	<b>87</b>	<b>107</b>	<b>291</b>	<b>223</b>

## RENCANA ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014 MENURUT JENIS PUPUK, SUB SEKTOR, DAN SEBARAN BULAN

**A. PUPUK UREA:** (TON)

NO.	SUB SEKTOR	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	520	9	8	7	20	85	85	16	16	17	102	131	24
2	Peternakan	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
3	Perikanan Budidaya	22	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	3
	<b>JUMLAH</b>	<b>547</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>87</b>	<b>86</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>105</b>	<b>134</b>	<b>28</b>

**B. PUPUK SP-36:** (TON)

NO.	SUB SEKTOR	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	70	4	4	1	4	11	11	3	4	1	10	13	4
2	Peternakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Perikanan Budidaya	17	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
	<b>JUMLAH</b>	<b>87</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>6</b>

**C. PUPUK ZA:** (TON)

NO.	SUB SEKTOR	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	104	1	1	1	2	22	20	3	3	2	23	23	3
2	Peternakan	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
3	Perikanan Budidaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>107</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>3</b>

## D. PUPUK NPK:

NO.	SUB SEKTOR	Setahun	(TON)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	291	5	9	2	9	50	55	9	10	3	59	65	15
2	Peternakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Perikanan Budidaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	291	5	9	2	9	50	55	9	10	3	59	65	15

## E. PUPUK ORGANIK:

NO.	SUB SEKTOR	Setahun	(TON)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	202	5	6	6	12	27	8	9	9	43	37	28	12
2	Peternakan	4	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0
3	Perikanan Budidaya	17	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
	JUMLAH	223	7	8	7	14	28	10	10	11	45	39	30	14



## ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

(TON)

NO.	KECAMATAN	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	MEDAN BELAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEDAN LABUHAN	270	0	0	30	20	30	30	40	20	0	0	80	20
3	MEDAN DELI	60	0	0	0	0	0	0	0	20	0	40	0	0
4	MEDAN SUNGGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEDAN HELVETIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MEDAN DENAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	MEDAN TEMBUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	MEDAN TUNTUNGAN	55	0	0	0	0	15	0	20	0	0	20	0	0
9	MEDAN SELAYANG	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0
10	MEDAN JOHOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	MEDAN AMPLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	MEDAN BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	MEDAN POLONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	MEDAN MAIMUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	MEDAN BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	MEDAN PETISAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	MEDAN KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	MEDAN AREA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	MEDAN TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	MEDAN MARELAN	115	0	0	0	0	30	0	35	0	0	35	15	0
21	MEDAN PERJUANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	J U M L A H	520	0	0	30	20	75	30	95	40	20	95	95	20

## SUB SEKTOR PETERNAKAN

(TON)

NO.	KECAMATAN	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	MEDAN BELAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEDAN LABUHAN	1.2	0	0.5	0	0	0	0	0	0.3	0	0	0	0.4
3	MEDAN DELI	1.1	0	0.4	0	0	0	0	0	0.3	0	0.4	0	0
4	MEDAN SUNGGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEDAN HELVETIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MEDAN DENAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	MEDAN TEMBUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	MEDAN TUNTUNGAN	1.2	0	0	0	0.3	0	0.3	0	0	0	0.3	0	0.3
9	MEDAN SELAYANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	MEDAN JOHOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	MEDAN AMPLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	MEDAN BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	MEDAN POLONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	MEDAN MAIMUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	MEDAN BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	MEDAN PETISAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	MEDAN KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	MEDAN AREA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	MEDAN TIMUR	1.2	0	0	0	0.3	0	0.3	0	0	0	0.3	0	0.3
20	MEDAN MARELAN	1.5	0	0.5	0	0	0	0.4	0	0.3	0	0	0	0.3
21	MEDAN PERJUANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	J U M L A H	6.2	0	1.4	0	0.6	0	1	0	0.9	0	1	0	1.3

## SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA

(TON)

NO.	KECAMATAN	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	MEDAN BELAWAN	9	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
2	MEDAN LABUHAN	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
3	MEDAN DELI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	MEDAN SUNGGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEDAN HELVETIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MEDAN DENAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	MEDAN TEMBUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	MEDAN TUNTUNGAN	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
9	MEDAN SELAYANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	MEDAN JOHOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	MEDAN AMPLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	MEDAN BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	MEDAN POLONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	MEDAN MAIMUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	MEDAN BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	MEDAN PETISAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	MEDAN KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	MEDAN AREA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	MEDAN TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	MEDAN MARELAN	8	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
21	MEDAN PERJUANGAN	8	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
	J U M L A H	30	0	0	3	3	3	3	0	3	4	5	4	2

## ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

NO.	KECAMATAN	Setahun	SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (TON)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	MEDAN BELAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEDAN LABUHAN	16	2	0	0	2	1	1	2	2	0	1	3	2
3	MEDAN DELI	10	0	2	0	1	1	1	0	0	1	2	0	2
4	MEDAN SUNGGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEDAN HELVETIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MEDAN DENAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	MEDAN TEMBUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	MEDAN TUNTUNGAN	17	2	0	1	2	2	1	2	2	0	2	3	0
9	MEDAN SELAYANG	15	1	2	0	1	2	2	1	1	0	2	2	1
10	MEDAN JC HOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	MEDAN AMPLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	MEDAN BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	MEDAN POLONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	MEDAN MAIMUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	MEDAN BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	MEDAN PETISAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	MEDAN KC TA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	MEDAN AREA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	MEDAN TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	MEDAN MARELAN	11	1	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	MEDAN PERJUANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	J U M L A H	69	6	4	2	7	7	6	6	6	2	8	9	6



## SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA

(TON)

NO.	KECAMATAN	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	MEDAN BELAWAN	5	0	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0	0.5	0.5	1	1
2	MEDAN LABUHAN	4.5	0	0	0.5	0.5	1	0	0	0.5	0.5	0.5	0	1
3	MEDAN DELI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	MEDAN SUNGGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEDAN HELVETIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MEDAN DENAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	MEDAN TEMBUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	MEDAN TUNTUNGAN	4.5	0	0	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0.5	0.5	1	1
9	MEDAN SELAYANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	MEDAN JGHOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	MEDAN AMPLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	MEDAN BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	MEDAN POLONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	MEDAN MAIMUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	MEDAN BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	MEDAN PETISAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	MEDAN KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	MEDAN AREA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	MEDAN TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	MEDAN MARELAN	12	6	3	0.5	0.5	0	0	0	0	0.5	0.5	0.5	0.5
21	MEDAN PERJUANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	J U M L A H	26	6	3	2	2	2	0.5	0	0.5	2	2	2.5	3.5

## ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

NO.	KECAMATAN	Setahun	SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (TON)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	MEDAN BELAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEDAN LABUHAN	44	1	0	0	2	7	8	2	1	1	10	10	2
3	MEDAN DELI	15	0	1	0	0	3	2	2	1	0	2	3	1
4	MEDAN SUNGGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEDAN HELVETIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MEDAN DENAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	MEDAN TEMBUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	MEDAN TUNTUNGAN	16	0	1	1	3	3	0	0	1	3	3	1	0
9	MEDAN SELAYANG	16	0	1	0	3	3	0	0	1	1	3	3	1
10	MEDAN JOHOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	MEDAN AMPLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	MEDAN BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	MEDAN POLONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	MEDAN MAIMUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	MEDAN BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	MEDAN PETISAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	MEDAN KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	MEDAN AREA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	MEDAN TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	MEDAN MARELAN	13	0	0	0	0	2	2	1	1	1	3	2	1
21	MEDAN PERJUANGAN	16	0	1	0	3	3	0	1	1	3	3	0	1
	J U M L A H	120	1	4	1	11	21	12	6	6	9	24	19	6

## SUB SEKTOR PETERNAKAN

(TON)

NO.	KECAMATAN	Sejarah	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	MEDAN BELAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEDAN LABUHAN	2	1	0	0.5	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0
3	MEDAN DELI	2	1	0	0.5	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0
4	MEDAN SUNGGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEDAN HELVETIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MEDAN DENAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	MEDAN TEMBUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	MEDAN TUNTUNGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	MEDAN SELAYANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	MEDAN JOHOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	MEDAN AMPLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	MEDAN BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	MEDAN POLONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	MEDAN MAIMUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	MEDAN BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	MEDAN PETISAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	MEDAN KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	MEDAN AREA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	MEDAN TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	MEDAN MARELAN	1	0	0	0.5	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0
21	MEDAN PERJUANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	J U M L A H	5	2	0	1.5	0	0	1	0	0.5	0	0	0	0





## ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

(TON)

NO.	KECAMATAN	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	MEDAN BELAWAN	0	9	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
2	MEDAN LABUHAN	78	2	2	1	4	12	8	5	2	1	23	15	3
3	MEDAN DELI	53	1	1	0	2	10	10	2	1	1	11	12	2
4	MEDAN SUNGGAL	9	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEDAN HELVETIA	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
6	MEDAN DENAI	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0
7	MEDAN TEMBUNG	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	MEDAN TUNTUNGAN	63	2	1	1	3	8	9	3	2	1	15	15	3
9	MEDAN SELAYANG	48	1	1	0	3	8	7	3	3	1	6	12	3
10	MEDAN JOHOR	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
11	MEDAN AMPLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	MEDAN BARU	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	MEDAN POLONIA	0	0	9	0	0	0	0	9	0	9	0	0	0
14	MEDAN MAIMUN	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	MEDAN BARAT	0	0	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0
16	MEDAN PETISAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	MEDAN KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	MEDAN AREA	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	MEDAN TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	MEDAN MARELAN	49	1	1	0	1	10	7	1	4	1	9	12	2
21	MEDAN PERJUANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	J U M L A H	291	7	6	2	13	48	41	14	12	5	64	66	13





## ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

(TON)

NO.	KECAMATAN	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	MEDAN BELAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEDAN LABUHAN	27	0	1	1	2	5	1	1	0	5	8	1	2
3	MEDAN DELI	19	0	1	0	1	2	4	1	1	0	4	4	1
4	MEDAN SUNGGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEDAN HELVETIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MEDAN DENAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	MEDAN TEMBUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	MEDAN TUNTUNGAN	61	0	1	1	3	8	9	3	2	1	15	15	3
9	MEDAN SELAYANG	47	0	1	0	3	8	7	3	3	1	6	12	3
10	MEDAN JOHOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	MEDAN AMPLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	MEDAN BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	MEDAN POLONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	MEDAN MAIMUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	MEDAN BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	MEDAN PETISAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	MEDAN KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	MEDAN AREA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	MEDAN TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	MEDAN MARELAN	48	0	1	0	1	10	7	1	4	1	9	12	2
21	MEDAN PERJUANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	J U M L A H	202	0	5	2	10	33	28	9	10	8	42	44	11

(TON)

SUB SEKTOR PETERNAKAN															
NO.	KECAMATAN	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	MEDAN BELAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	MEDAN LABUHAN	1	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	
3	MEDAN DELI	0.5	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	
4	MEDAN SUNGGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	MEDAN HELVETIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	MEDAN DENAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	MEDAN TEBUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	MEDAN TUNTUNGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	MEDAN SELAYANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	MEDAN JOHOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	MEDAN AMPLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	MEDAN BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	MEDAN POLONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	MEDAN MAIMUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	MEDAN BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	MEDAN PETISAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	MEDAN KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	MEDAN AREA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	MEDAN TIMUR	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0	
20	MEDAN MARELAN	1	0	0	0.5	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	
21	MEDAN PERJUANGAN	1	0	0.5	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	
	J U M L A H	4	0	0.5	0	1	0	0.5	0	1	0	0.5	0	0.5	

## SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA

(TON)

NO.	KECAMATAN	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	MEDAN BELAWAN	5	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1
2	MEDAN LABUHAN	3	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0
3	MEDAN DELI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	MEDAN SUNGGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEDAN HELVETIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MEDAN DENAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	MEDAN TEMBUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	MEDAN TUNTUNGAN	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0
9	MEDAN SELAYANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	MEDAN JGHGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	MEDAN AMPLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	MEDAN BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	MEDAN POLONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	MEDAN MAJUMUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	MEDAN BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	MEDAN PETISAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	MEDAN KGTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	MEDAN AREA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	MEDAN TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	MEDAN MARELAN	4	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1
21	MEDAN PERJUANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	J U M L A H	16	0	0	1	2	0	2	2	2	1	1	3	2

## ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

(TON)

NO.	KECAMATAN	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	MEDAN BELAWAN	9	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
2	MEDAN LABUHAN	274.2	0	0.5	30	20	30	30	40	20.3	0	1	81	21.4
3	MEDAN DELI	61.1	0	0.4	0	0	0	0	0	20.3	0	40.4	0	0
4	MEDAN SUNGGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEDAN HELVETIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MEDAN DENAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	MEDAN TEMBUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	MEDAN TUNTUNGAN	58.2	0	0	0	0.3	15	0.3	20	0	1	21.3	0	0.3
9	MEDAN SELAYANG	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0
10	MEDAN JOHOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	MEDAN AMPLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	MEDAN BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	MEDAN POLONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	MEDAN MAIMUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	MEDAN BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	MEDAN PETISAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	MEDAN KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	MEDAN AREA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	MEDAN TIMUR	1.2	0	0	0	0.3	0	0.3	0	0	0	0.3	0	0.3
20	MEDAN MARELAN	124.5	0	0.5	1	1	31	1.4	35	1.3	1	36	16	0.3
21	MEDAN PERJUANGAN	8	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
	J U M L A H	556.2	0	1.4	33	23.6	78	34	95	43.9	24	101	99	23.3



## ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

(TON)

NO.	KECAMATAN	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	MEDAN BELAWAN	5	0	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0	0.5	0.5	1	1
2	MEDAN LABUHAN	20.5	2	0	0.5	2.5	2	1	2	2.5	0.5	1.5	3	3
3	MEDAN DELI	10	0	2	0	1	1	1	0	0	1	2	0	2
4	MEDAN SUNGGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEDAN HELVETIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MEDAN DENAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	MEDAN TEMBUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	MEDAN TUNTUNGAN	21.5	2	0	1.5	2.5	2.5	1	2	2	0.5	2.5	4	1
9	MEDAN SELAYANG	15	1	2	0	1	2	2	1	1	0	2	2	1
10	MEDAN JOHOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	MEDAN AMPLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	MEDAN BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	MEDAN POLONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	MEDAN MAIMUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	MEDAN BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	MEDAN PETISAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	MEDAN KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	MEDAN AREA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	MEDAN TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	MEDAN MARELAN	23	7	3	1.5	1.5	1	1	1	1	1.5	1.5	1.5	1.5
21	MEDAN PERJUANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	J U M L A H	95	12	7	4	9	9	6.5	6	6.5	4	10	11.5	9.5

## ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

NO.	KECAMATAN	Setahun	(TON)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	MEDAN BELAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEDAN LABUHAN	46	2	0	0.5	2	7	8	2	1.5	1	10	10	2
3	MEDAN DELI	17	1	1	0.5	0	3	2.5	2	1	0	2	3	1
4	MEDAN SUNGGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEDAN HELVETIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MEDAN DENAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	MEDAN TEMBUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	MEDAN TUNTUNGAN	16	0	1	1	3	3	0	0	1	3	3	1	0
9	MEDAN SELAYANG	16	0	1	0	3	3	0	0	1	1	3	3	1
10	MEDAN JOHOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	MEDAN AMPLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	MEDAN BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	MEDAN POLONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	MEDAN MAIMUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	MEDAN BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	MEDAN PETISAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	MEDAN KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	MEDAN AREA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	MEDAN TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	MEDAN MARELAN	14	0	0	0.5	0	2	2.5	1	1	1	3	2	1
21	MEDAN PERJUANGAN	16	0	1	0	3	3	0	1	1	3	3	0	1
	J U M L A H	125	3	4	2.5	11	21	13	6	6.5	9	24	19	6

## ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

(TON)

NO.	KECAMATAN	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	MEDAN BELAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEDAN LABUHAN	78	2	2	1	4	12	8	5	2	1	23	15	3
3	MEDAN DELI	53	1	1	0	2	10	10	2	1	1	11	12	2
4	MEDAN SUNGGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEDAN HELVETIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MEDAN DENAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	MEDAN TEMBUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	MEDAN TUNTUNGAN	63	2	1	1	3	8	9	3	2	1	15	15	3
9	MEDAN SELAYANG	48	1	1	0	3	8	7	3	3	1	6	12	3
10	MEDAN JOHOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	MEDAN AMPLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	MEDAN BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	MEDAN POLONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	MEDAN MAIMUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	MEDAN BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	MEDAN PETISAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	MEDAN KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	MEDAN AREA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	MEDAN TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	MEDAN MARELAN	49	1	1	0	1	10	7	1	4	1	9	12	2
21	MEDAN PERJUANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	J U M L A H	291	7	6	2	13	48	41	14	12	5	64	66	13

## ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

(TON)

NO.	KECAMATAN	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	MEDAN BELAWAN	5	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1
2	MEDAN LABUHAN	31	0	1	2	2.5	5	1	1	1	5	9	1	2.5
3	MEDAN DELI	19.5	0	1	0	1	2	4.5	1	1	0	4	4	1
4	MEDAN SUNGGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEDAN HELVETIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MEDAN DENAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	MEDAN TEMBUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	MEDAN TUNTUNGAN	65	0	1	1	4	8	10	3	3	1	15	16	3
9	MEDAN SELAYANG	47	0	1	0	3	8	7	3	3	1	6	12	3
10	MEDAN JOHOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	MEDAN AMPLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	MEDAN BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	MEDAN POLONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	MEDAN MAIMUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	MEDAN BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	MEDAN PETISAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	MEDAN KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	MEDAN AREA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	MEDAN TIMUR	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0
20	MEDAN MARELAN	53	0	1	0	2.5	10	7	2	4.5	1	9	13	3
21	MEDAN PERJUANGAN	1	0	0.5	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0
	J U M L A H	222	0	5.5	3	13	33	30.5	11	13	9	43.5	47	13.5

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014  
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN

NO.	KECAMATAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	2	3	4	5	6	7
1	MEDAN BELAWAN	9	5	0	0	5
2	MEDAN LABUHAN	274.2	20.5	46	78	31
3	MEDAN DELI	61.1	10	17	53	19.5
4	MEDAN SUNGGAL	0	0	0	0	0
5	MEDAN HELVETIA	0	0	0	0	0
6	MEDAN DENAI	0	0	0	0	0
7	MEDAN TEBUNG	0	0	0	0	0
8	MEDAN TUNTUNGAN	58.2	21.5	16	63	65
9	MEDAN SELAYANG	20	15	16	48	47
10	MEDAN JOHOR	0	0	0	0	0
11	MEDAN AMPLAS	0	0	0	0	0
12	MEDAN BARU	0	0	0	0	0
13	MEDAN POLONIA	0	0	0	0	0
14	MEDAN MAJMUN	0	0	0	0	0
15	MEDAN BARAT	0	0	0	0	0
16	MEDAN PETISAH	0	0	0	0	0
17	MEDAN KOTA	0	0	0	0	0
18	MEDAN AREA	0	0	0	0	0
19	MEDAN TIMUR	1.2	0	0	0	0.5
20	MEDAN MARELAN	124.5	23	14	49	53
21	MEDAN PERJUANGAN	8	0	16	0	1
<b>JUMLAH</b>		<b>556.2</b>	<b>95</b>	<b>125</b>	<b>291</b>	<b>154</b>

PI. WALIKOTA MEDAN  
WAKIL WALIKOTA,

ttt

DZULMI ELDIN S